



The Influence Of Financial Transparency On Community Participation In The Management Of Village Funds: A Study Of Srigunting Village.

Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Srigunting

Nabila Nahda Maliha Samudra ¹⁾; Agus Tripriyono ²⁾; Hendra Saputra ³⁾; Ayu Kuria Sari ⁴⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ¹⁾malihhasamudra04@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 Maret 2026]
Revised [29 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Government Accounting Standards, Regional Financial Reports, Effectiveness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana transparansi keuangan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Srigunting. Latar belakang penelitian ini muncul dari kondisi masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, perencanaan, dan pengawasan dana desa yang diduga berkaitan dengan penyampaian informasi keuangan yang belum sepenuhnya mudah dipahami. Penelitian ini berfokus pada tiga hal, yaitu tingkat transparansi keuangan, tingkat partisipasi masyarakat, serta hubungan antara keduanya. Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh konsep transparansi keuangan, partisipasi masyarakat, serta Teori Keagenan dan Teori Stewardship yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam membangun kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan informasi melalui musyawarah dan laporan anggaran, namun masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi yang membuat sebagian masyarakat kurang memahami isi laporan tersebut. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan warga, sehingga semakin jelas dan terbuka informasi yang disampaikan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

This study examines how financial transparency influences community participation in the management of village funds in Srigunting Village. The background of this research arises from the relatively low level of community involvement in deliberation, planning, and supervision of village funds, which is presumed to be related to the delivery of financial information that is not yet fully accessible and easily understood. This study focuses on three main aspects: the level of financial transparency, the level of community participation, and the relationship between the two. Theoretically, this research is supported by the concepts of financial transparency and community participation, as well as Agency Theory and Stewardship Theory, which emphasize the importance of information disclosure in building public trust. The results indicate that the village government has provided information through public deliberations and budget reports; however, there are still limitations in how the information is presented, making it difficult for some community members to fully comprehend the reports. This condition affects the level of community involvement, suggesting that the clearer and more transparent the information.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan Dana desa diberikan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Besarnya dana yang diterima setiap desa membuat pengelolaan yang transparan menjadi sangat penting, termasuk di desa Srigunting. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga faktor yang menentukan apakah masyarakat mau terlibat dalam proses pembangunan. Tanpa informasi yang terbuka dan mudah dipahami, masyarakat sulit memberi masukan atau mengawasi jalannya penggunaan dana desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, desa Srigunting sudah berusaha menampilkan laporan anggaran, baik dalam bentuk APBDes maupun laporan realisasi. Laporan biasanya ditempel di papan pengumuman dan dibacakan kembali saat musyawarah desa. Namun penyampaian tersebut belum sepenuhnya membuat masyarakat terlibat aktif. Sebagian warga mengaku hanya melihat papan informasi tanpa benar-benar memahami perbedaan antara anggaran dan realisasi. Ada juga yang berpendapat bahwa penjelasan mengenai kegiatan lebih banyak disampaikan secara lisan sehingga detail rinciannya tidak terdokumentasi dengan baik.

Kondisi ini terlihat jelas pada tahun 2024 ketika pemerintah desa membagikan laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut sudah ditempel dan difoto ulang oleh beberapa warga, namun respons masyarakat tetap rendah. Jumlah warga yang hadir pada musrenbang hanya sekitar seperempat dari total undangan. Sebagian ketua RT menyampaikan bahwa masih banyak warga yang tidak paham bagaimana dana desa dialokasikan maupun digunakan. Minimnya pemahaman ini bukan tanpa sebab. Format laporan keuangan biasanya bersifat teknis sehingga sulit dipahami bagi warga yang belum terbiasa membaca tabel anggaran.

Tabel 1 Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Desa Srigunting

Bidang Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Keterangan
Pembangunan Jalan Lingkungan	350.000.000	345.250.000	98.6%	Banyak warga tidak mengetahui harga material dan proses pemilihan penyedia jasa
Pemberdayaan Masyarakat	120.000.000	89.500.000	74.5%	Informasi kegiatan hanya disampaikan pada rapat tertentu
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	250.000.000	249.000.000	99.6%	Laporan ditempel tetapi tanpa penjelasan rinci
Penanggulangan Bencana dan Darurat	75.000.000	32.750.000	43.7%	Minim informasi mengenai bentuk kegiatan yang sudah dilakukan
Total	795.000.000	716.500.000	90.1%	—

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Srigunting

Angka tersebut menunjukkan bahwa secara administratif laporan sudah disediakan, tetapi tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Hal inilah yang memperkuat dugaan bahwa tingkat transparansi keuangan masih belum optimal sehingga masyarakat belum merasa perlu atau belum yakin untuk terlibat secara aktif.

Angka tersebut menunjukkan bahwa secara administratif laporan sudah disediakan, tetapi tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Hal inilah yang memperkuat dugaan bahwa tingkat transparansi keuangan masih belum optimal sehingga masyarakat belum merasa perlu atau belum yakin untuk terlibat secara aktif.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana transparansi keuangan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa Srigunting. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa agar proses penyebaran informasi keuangan berjalan lebih efektif dan terbuka.

Berdasarkan pra-survei yang dilakukan terhadap 20 warga desa Srigunting, ditemukan bahwa sebagian besar responden mengakui masih ada masalah dalam penyampaian informasi keuangan desa, terutama terkait laporan penggunaan dana desa. Warga menyampaikan bahwa informasi yang dipasang di papan pengumuman sulit dipahami, sementara penjelasan lisan dalam rapat tidak selalu menjangkau semua masyarakat. Hasil pra-survei ini memperkuat dugaan bahwa transparansi keuangan belum sepenuhnya berjalan efektif dan berdampak pada rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Temuan awal menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Srigunting berkaitan dengan masih terbatasnya informasi yang diberikan pemerintah desa, sehingga warga kesulitan memberikan kontribusi karena tidak memahami secara jelas penggunaan anggaran maupun akses informasi yang tersedia. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain laporan anggaran yang sulit dipahami karena dipenuhi istilah teknis dan angka-angka APBDesa sosialisasi yang belum menjangkau seluruh warga karena musyawarah hanya dihadiri sebagian masyarakat, kurangnya penjelasan rinci mengenai harga material, penyedia jasa, serta Tahapan kegiatan pembangunan, menurunnya kehadiran masyarakat dalam musrenbang akibat minimnya informasi awal, serta adanya perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat terkait tingkat transparansi yang telah dilakukan. Penelitian ini dibatasi pada aspek transparansi keuangan yang meliputi penyediaan informasi anggaran, laporan realisasi, serta keterbukaan proses pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat yang mencakup kehadiran dalam musyawarah, keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, serta peran dalam memberikan masukan dan pengawasan, dengan lokasi penelitian di Desa Srigunting dan data diperoleh melalui dokumen resmi, wawancara, serta observasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat transparansi keuangan pemerintah desa, mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, serta menganalisis pengaruh transparansi keuangan terhadap partisipasi masyarakat.



LANDASAN TEORI

Transparansi Keuangan

Pengertian Transparansi Keuangan Transparansi keuangan merupakan prinsip keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan seluruh informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana kepada masyarakat. Transparansi tidak hanya berarti informasi tersedia, tetapi juga harus mudah diakses, dipahami, akurat, dan disampaikan tepat waktu. Keterbukaan ini menjadi dasar terciptanya akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Prinsip dan Indikator Transparansi Keuangan Transparansi dibangun melalui prinsip keterbukaan informasi, kemudahan akses, kejujuran dan akurasi data, ketepatan waktu pelaporan, serta akuntabilitas publik. Indikatornya meliputi ketersediaan dokumen seperti APBDes dan laporan realisasi, kelengkapan rincian anggaran, kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi, pemahaman warga terhadap isi laporan, serta konsistensi pembaruan informasi. Keberhasilan penerapannya dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, komitmen kepemimpinan, ketersediaan sarana informasi, dan tingkat kesadaran masyarakat.

Dana Pihak Ketiga Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan yang didanai oleh dana desa. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol terhadap kebijakan desa.

Bentuk dan Faktor Pendorong Partisipasi

Partisipasi dapat berbentuk kehadiran dalam musyawarah desa, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan, pengawasan penggunaan anggaran, serta pemberian saran dan kritik. Tingkat partisipasi dipengaruhi oleh transparansi keuangan, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kualitas komunikasi pemerintah desa, kepemimpinan kepala desa, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Prinsip dan Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin anggaran, dan tertib administrasi. Prosesnya meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan membutuhkan dokumentasi yang jelas agar dapat diawasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana transparansi keuangan dilaksanakan serta bagaimana partisipasi masyarakat terbentuk dalam pengelolaan dana desa di Desa Sri Gunting. Penelitian tidak berfokus pada pengujian angka atau hubungan statistik, melainkan pada pemaknaan fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan keterlibatan langsung para pihak yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian difokuskan pada satu desa sebagai objek penelitian sehingga memungkinkan peneliti menggali secara lebih rinci kebijakan, praktik, serta dinamika yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Analisis data dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data berlangsung. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu proses memilih dan memfokuskan data yang relevan; penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul di lapangan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi desa guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Kalau kamu mau, aku bisa bantu sesuaikan lagi gaya bahasanya supaya benar-benar seragam dari Bab I sampai Bab III biar tidak terasa beda penulisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan aparatur desa dan masyarakat, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi terkait pengelolaan dana desa. Penelitian ini berfokus pada dua variabel utama:



- a. Transparansi Keuangan Desa
- b. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi Keuangan Desa Srigunting

Transparansi keuangan desa merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, pemerintah Desa Srigunting telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan transparansi, antara lain:

- a. **Transparansi pada Tahap Perencanaan**
Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta perwakilan warga. Dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan usulan pembangunan. Informan menyatakan bahwa masyarakat dapat mengetahui rencana penggunaan dana desa sejak awal melalui forum musyawarah
- b. **Transparansi pada Tahap Pelaksanaan**
Selama pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemerintah desa memasang papan informasi proyek yang memuat: jenis kegiatan, sumber anggaran, jumlah biaya, waktu pelaksanaan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa.

- a. **Partisipasi pada Tahap Perencanaan**
Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan seperti perbaikan jalan lingkungan dan fasilitas umum. Tingkat kehadiran masyarakat cukup baik, meskipun partisipasi aktif dalam diskusi masih didominasi tokoh masyarakat.
- b. **Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan**
Partisipasi masyarakat terlihat melalui kegiatan gotong royong, keterlibatan sebagai tenaga kerja pembangunan, dukungan sosial terhadap program desa. Keterlibatan ini menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap pembangunan desa.
- c. **Partisipasi pada Tahap Pengawasan**
Masyarakat melakukan pengawasan secara informal dengan mengamati langsung pelaksanaan pembangunan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat menyampaikan masukan kepada kepala dusun atau perangkat desa. Namun, mekanisme pengawasan formal oleh masyarakat masih belum optimal.

Pengaruh Transparansi Keuangan terhadap Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara transparansi keuangan dan partisipasi masyarakat. Ketika informasi anggaran disampaikan secara terbuka: masyarakat lebih percaya kepada pemerintah desa, masyarakat merasa dihargai dalam proses pembangunan, tingkat keterlibatan masyarakat meningkat. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman informasi menyebabkan sebagian masyarakat bersikap pasif. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan secara mudah dipahami masyarakat.

Pembahasan

Transparansi Keuangan dalam Perspektif Good Governance

Prinsip transparansi merupakan bagian dari konsep good governance yang menekankan keterbukaan informasi publik. Pemerintah desa wajib memberikan akses informasi agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Srigunting telah menerapkan transparansi melalui penyediaan informasi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Hal ini menunjukkan adanya upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka.

Partisipasi Masyarakat sebagai Faktor Keberhasilan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan desa. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, maka program pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi di Desa Srigunting sudah terlihat pada tahap pelaksanaan pembangunan, namun masih perlu ditingkatkan pada tahap pengawasan dan evaluasi program.



Pengaruh Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian, transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat karena:

- a. meningkatkan kepercayaan masyarakat,
- b. mengurangi kecurigaan terhadap penggunaan dana desa,
- c. mendorong masyarakat ikut serta dalam pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh transparansi keuangan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa Srigunting, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Transparansi keuangan di Desa Srigunting telah dilaksanakan dengan cukup baik, yang ditunjukkan melalui keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dana desa. Transparansi dilakukan melalui musyawarah desa, papan informasi anggaran, serta penyampaian laporan kegiatan kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa telah terlihat pada beberapa tahapan pembangunan, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian aspirasi dalam musyawarah desa, keterlibatan dalam kegiatan gotong royong, serta dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Namun, partisipasi pada tahap pengawasan dan evaluasi masih belum optimal.

Transparansi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah desa mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong rasa memiliki terhadap program pembangunan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa.

Meskipun transparansi telah diterapkan, Pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa masih terbatas, sehingga diperlukan upaya penyampaian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar partisipasi masyarakat dapat meningkat secara merata. Dengan demikian, transparansi keuangan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang partisipatif dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Srigunting
 - a. Pemerintah desa diharapkan meningkatkan kualitas transparansi keuangan dengan menyajikan informasi anggaran dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
 - b. Perlu dilakukan sosialisasi rutin mengenai pengelolaan dana desa agar masyarakat memahami proses penggunaan anggaran desa.
 - c. Pemerintah desa disarankan memperluas keterlibatan masyarakat tidak hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan.
2. Bagi Masyarakat Desa
 - a. Masyarakat diharapkan lebih aktif mengikuti musyawarah desa dan kegiatan pembangunan sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan dana desa.
 - b. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap pengawasan penggunaan dana desa guna mendukung pembangunan yang transparan dan akuntabel.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji transparansi keuangan desa menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat pengaruh secara statistik.
 - b. Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. (2019). Manajemen Personalia & Sumber daya Manusia. BPF.
- Manullang, M., & Pakpahan, M. (2015). Metode Penelitian: Proses Penelitian Praktis. Bandung: Cipta Pustaka Media
- Alwi, Hasan. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.



- Bastian, Indra. 2017. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. dan Kusufi, Syam. 2016. Teori, Konsep dan Aplikasi-Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat.
- Harnanto. 2019. Dasar-dasar Akuntansi. Edisi cetakan. 1. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukur Kinerja Sektor Publik. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi. s
- Nazir, M. (2018). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.]
- Rivai & Sagala. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Edisi.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. Mary Coulter. 2016. Manajemen. Edisi 13. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Serdamayanti. 2014. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.
- Silaen, Sofar. 2018. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Edisi revisi. Bogor: In Media.
- Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Adryanto, Verrys. 2019. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Kota Kediri (Studi pada BPPKAD Kota Kediri Tahun 2014-2017). Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Heldawati. 2021. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar. 69
- Khotimah, Ade. Khusnul. 2017. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014- 2017. Skripsi. Universitas Putra Bangsa Kebumen.
- Kiky, Muryanti. 2017. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Basri, Ramlah. 2018. Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Vol.1 No. 4, pp 202-212.
- Julita. 2015. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Index Kumpulan Dosen: Vol,10 No 02.
- Lamboan, Syurtika dan Venje. 2014. Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBE. ISSN 2023-1174. Vol 2, No. 3, Hal 952-961
- Makka, Harry. Al. 2015. Analisis Kinerja Belanja Dearah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, (221-333).
- Sari, N. P., & Yuliana, T. (2022). Pengaruh Penganggaran Partisipatif dan Asimetri Informasi terhadap Budgetary Slack dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 17(2), 115–124.
- Shofwah, Alful Laila Rosyidah Noor. Dan Nur, Handayani. 2019. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi (JIRA). 8.7.